

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nuklir Korea Utara bukanlah menjadi isu yang baru, melainkan sudah menjadi isu lama yang belum dapat di selesaikan. Korea Utara telah menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Alasan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai alat diplomasi adalah pertama, alasan *rezim survive*. Korea Utara menganggap, dengan kemampuannya terhadap nuklir dapat memberikan *deterrence effect*¹ atau efek gentar yang diharapkan bisa menggaransi kelangsungan hidup rezim komunis yang ada di Korea Utara.

Kedua yaitu alasan ekonomi. Salah satu alasan kenapa Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasinya yaitu untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari luar karena Korea Utara dikenal sebagai negara yang miskin. Hal ini dibuktikan disaat Korea Utara melakukan penghentian sementara terhadap program nuklirnya atau izin pemeriksaan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari Tiongkok dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korea Utara oleh pihak Korea Selatan dan Jepang.

Ketiga, alasan keamanan. Bagi Korea Utara, program nuklir yang dimilikinyaini merupakan cara diplomasi yang cukup efektif untuk membawa Amerika Serikat mengarah pada langkah negosiasi. Meskipun pada awalnya, tujuan pengembangan reaktor nuklir di Korea Utara ditujukan untuk penelitian, akan tetapi seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya ini sebagai Diplomasi

¹ Setiap negara berusaha untuk memiliki aset-aset militer yang mampu memberikan efek gentar.

Koersif² untuk dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya (Zuhri, 2010).

Disisi lain, Amerika Serikat bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok berupaya untuk membujuk Korea Utara sebagai salah satu upaya untuk membatalkan program nuklir tersebut dan dapat segera menghentikan keberlanjutan program nuklir Korea Utara yang dinilai akan berdampak terhadap munculnya bencana besar seperti kelaparan, kesengsaraan, dan kematian. Selain dapat membahayakan bagi lingkungan, kesehatan, dan kehidupan manusia, nampaknya program nuklir ini juga berpengaruh pada terjadinya kemerosotan ekonomi di sebagian negara kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan serta beberapa negara lainnya.

Korea Utara memang termasuk negara miskin dikarenakan adanya kemerosotan yang sudah terjadi sejak tahun 1990-an dimana adanya pemutusan hubungan kerjasama bilateral dengan mitra dagang utamanya, yaitu Uni Soviet dan juga munculnya pengaruh yang berasal dari Eropa Timur dengan mengkombinasikan peristiwa kelaparan akibat dari terjadinya peristiwa bencana banjir yang terjadi secara berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 2000 di Korea Utara. Kemudian, sejalan dengan lemahnya perekonomian negaranya, dalam bidang militer Korea Utara memiliki 1,08 juta personil militer atau sekitar 44% dari total populasi. Korea Utara juga telah menghabiskan 20–25 % total GNP (*Gross National Product*) negara dalam pengembangan program senjata nuklirnya (Zuhri, 2010, hal. 2).

Terkait dengan pengembangan nuklir Korea Utara yang dianggap mengancam keamanan dunia internasional, akhirnya pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama IAEA untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Perjanjian tersebut adalah NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty). Kemudian pada tahun tahun 1993, Korut mengancam akan mundur dari perjanjian

² Embargo ekonomi dari suatu Negara kepada Negara lain yang dianggap melanggar hukum internasional.

proliferasi nuklir, tetapi kemudian menundanya. Selang setahun kemudian, Korut dan Amerika Serikat (AS) menandatangani perjanjian di mana Pyongyang menutup reaktor nuklir berbasis plutonium Yongbyong dengan imbalan bantuan pembangunan dua reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik (Berlianto, 2016). Akan tetapi, pada tahun 2003, akhirnya Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari NPT.

Kemudian, pada tahun 2005 Korea Utara mengumumkan kepemilikannya terhadap senjata nuklir dan pada tahun 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang pertama yang memiliki kekuatan ledakan diperkirakan kurang dari satu kiloton dan peringatan uji coba diumumkan hanya 20 menit sebelum nuklir diluncurkan. Pada bulan yang sama dan di tahun yang sama, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek. Kekuatan ledakan nuklir hampir mendekati lima kiloton (Tempo.co, 2017). Pada Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal di atas negara Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Hal ini menjadi api kemarahan dunia internasional terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, negara-negara di dunia meminta agar Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi terkait uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara (Zuhri, 2010, hal. 6).

Empat tahun kemudian, tepatnya pada 12 Februari 2013, media Korea Utara juga mengumumkan bahwa negara tersebut telah melancarkan ujicoba nuklir bawah tanah yang merupakan uji coba ketiganya (Winata, 2014). Hal mengejutkan tersebut, terjadi sesudah terjadi negosiasi-negosiasi yang melibatkan negara – negara lain seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara. Mediasi *six party talks* yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Tiongkok ini diadakan pada tahun 2003 yang mencoba untuk mengurangi

potensi ancaman nuklir Korea Utara(Yesaya Anggia, 2016, hal. 51-52).

Uji coba nuklir Korea Utara ini mengundang beragam asumsi dari media massa dan publik yang menyatakan bahwa Tiongkok tengah berencana untuk menghentikan hubungan perdagangannya dengan Korea Utara(Yesaya Anggia, 2016). Meskipun Korea Utara menjadi salah satu anggota dari *six party talks* tersebut, akan tetapi pada 2009, Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari *Six Party Talk* dan melanjutkan program nuklirnya, sehingga hal tersebut mengakhiri *Six Party Talk*(Sudirman, 2016).

Isu uji coba nuklir Korea Utara tersebut direspon oleh negara-negara di dunia internasional salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok dan Korea Utara dikenal sebagai sekutu dekat. Hubungan bilateral keduanya terbilang dekat meskipun sebenarnya jika dilihat kembali, posisi Korea Utara tidak terlalu menguntungkan bagi Tiongkok. Akan tetapi, hingga saat ini hubungan bilateralnya masih tetap dipertahankan. Tiongkok selama ini telah banyak membantu Korea Utara. Memberi bantuan pangan pada masyarakat di Korea Utara, menjaga stabilitas rezim di sana, hingga menjadi negara yang melindungi Korea Utara dari pemberian sanksi atas uji coba nuklirnya.

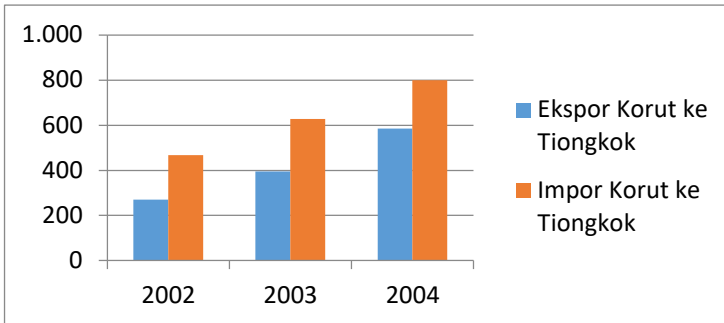
Salah satu faktor yang menyebabkan Tiongkok ikut serta dalam membantu Korea Utara karena, bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak diinginkan oleh Tiongkok salah satunya disebabkan karena di Korea Utara ada perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Korea Utara. Jika terjadi penyatuan, maka investasi perusahaan-perusahaan ini akan terganggu dan ikut mengganggu pemerintah Tiongkok pula. Selain itu, jika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu, maka Tiongkok tidak akan lagi memiliki *buffer state*³ terhadap Amerika Serikat (AS) yang pangkalan militernya ada di kawasan Asia Timur.

³Negara yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dominan.

Tiongkok saat ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru dimana pertumbuhannya yang meningkat setiap tahunnya (Qomara, 2015). Pertumbuhan Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia selama tiga dekade terakhir. Saat ini, Tiongkok adalah pabrik dunia yang tidak hanya memproduksi garmen dan mainan tetapi juga komponen komputer, mobil, dan pesawat terbang. Tiongkok berhasil meluncurkan misi ke luar angkasa dan berencana akan melakukan eksplorasi lanjutan. Tiongkok menginvestasikan teknologi tinggi seperti nanoteknologi dan sel bahan bakar yang akan membantu membangun kepemimpinan negara dalam perekonomian dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok termasuk dalam lima tujuan utama investasi industri luar negeri di dunia. Konsumsi bahan besi, aluminium, tembaga, dan baja mencapai 20% dari konsumsi global.

Dalam hubungan kemitraannya yang erat antara Tiongkok dengan Korea Utara, Tiongkok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan negara lain untuk menekan Korea Utara. Selain itu, Tiongkok juga dipandang sebagai negara yang paling mampu memaksakan sanksi ekonomi ke Korea Utara yang berdampak langsung. Bagi Korea Utara, Tiongkok merupakan rekan dagang utamanya. Hal tersebut terjadi karena perdagangan antara Korea Utara dengan Tiongkok tersebut menyumbang sebagian besar perdagangan internasional Korea Utara dan dianggap penting untuk pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial Korea Utara. Meskipun Korea Utara terus melakukan pengembangan terhadap program nuklirnya yang sudah dimulai sejak tahun 1956, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Tiongkok untuk terus bekerjasama dengan Korea Utara. Hal ini dibuktikan dengan presentase ekspor – impor antara Korea Utara dengan Tiongkok yang terus meningkat dari tahun 2002–2004.

Grafik 1.1. (Grafik peningkatan nilai ekspor – impor Korea Utara dengan Tiongkok tahun 2002 – 2004. Unit presentase : \$10.000)



Sumber : <https://www.northkoreaintheworld.org/china-dprk/total-trade>, diakses pada 16 Maret 2018, pukul 08. 35 WIB.

Berdasarkan grafik 1.1, bahwa pada tahun 2002 nilai ekspor Korea Utara dengan Tiongkok sebesar \$270,68juta dan impor dari Tiongkok ke Korea Utara sebesar \$467,31 juta. Pada tahun 2003 meningkat dimana nilai ekspor Korea Utara ke Tiongkok sebesar \$395,34 juta dan nilai impor dari Tiongkok ke Korea Utara sebesar \$627,583 juta dan pada tahun 2004 nilai ekspor Korea Utara ke Tiongkok sebesar \$585,70 juta dan nilai impor dari Tiongkok ke Korea Utara sebesar \$799,50 juta. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2002 – 2004 tingkat nilai ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok terus meningkat (Northkoreaintheworld.org, 2017).

Akan tetapi di tahun 2006 yaitu setelah uji coba nuklir pertama yang dilakukan oleh Korea Utara, mulai terjadi ketegangan terhadap hubungan antara Korea Utara dengan Tiongkok yang menyebabkan adanya ketidakstabilan terhadap tingkat ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok (Albert, 2017). Meskipun begitu, Tiongkok masih tetap berusaha untuk melakukan pembelaan terhadap Korea Utara terkait pengembangan nuklirnya disaat negara – negara lain

menginginkan adanya penghentian pengembangan nuklir Korea Utara yang dianggap akan membahayakan dunia internasional. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tiongkok yang bersikeras menyebutkan bahwa Korea Utara memiliki hak atas pengembangan nuklir dan teknologi rudal secara damai.

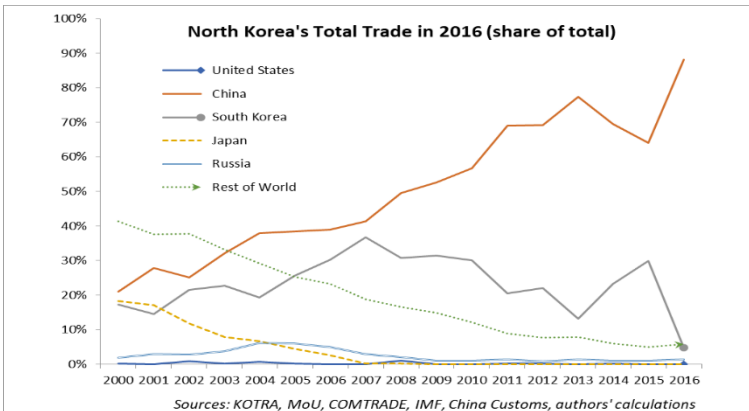
Begitu juga ketika dalam proses pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874, Tiongkok berupaya melemahkan isi sanksi dengan mengusulkan mekanisme tidak mengikat inspeksi kapal dan kargo yang dianggap mencurigakan. Meskipun pada saat itu, pemerintah AS telah berupaya menekan Tiongkok untuk menggunakan pengaruh ekonomi dengan membatasi hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Korea Utara, namun usulan ini ditolak dengan alasan langkah tersebut dapat menghambat perdagangan resmi dan saluran kemanusiaan (Mahrita, 2016, hal. 530).

Meskipun Tiongkok selalu memberikan pembelaan terhadap Korea Utara terkait uji coba nuklirnya, akan tetapi pada tahun 2013 setelah berlangsungnya uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga tersebut, Tiongkok justru menunjukkan pola sikap yang berbeda yang ditunjukkan dengan adanya artikulasi jelas dari pejabat pemerintahan Tiongkok dalam mengemukakan uji coba nuklir ketiga tersebut. Xi Jinping menyebut uji coba ketiga nuklir Korea Utara merupakan sumber ancaman bagi stabilitas kawasan regional Asia Timur. Empat tahun setelah Pyongyang mengumumkan kepemilikan senjata nuklir, pemerintah Tiongkok juga perlahan-lahan mengendurkan relasi dengan Korea Utara yang ditandai dengan pernyataan Perdana Menteri Tiongkok Yang Jiechi pada 2013 yang mengatakan bahwa Tiongkok menolak sejumlah uji coba pengembangan persenjataan nuklir yang dilakukan Kim Jong-un. Namun, tes rudal nuklir dan misil jarak jauh terus dilakukan (Hasan, 2017). Selain itu pada 5 Mei 2013, Korea Utara menyita kapal nelayan Tiongkok dan meminta uang tebusan sebagai biaya ganti pengembalian. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara sudah mulai menunjukkan

sikap perlawanan terhadap Tiongkok karena selama ini, Korea Utara selalu menunjukkan sikap patuh terhadap Tiongkok.

Setelah terjadinya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut pun, hubungan perdagangan antara Korea Utara dan Tiongkok masih terus berlanjut hingga saat ini. Akan tetapi hubungan yang terjalin tersebut semakin lama semakin menjauh. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan terhadap nilai ekspor dan impor antara Korea Utara dengan Tiongkok dari tahun 2013 – 2015.

Grafik 1.2 (Grafik Total Perdagangan yang dilakukan oleh Korea Utara)



Source : <https://piie.com/blogs/north-korea-witness-transformation/north-korea-china-trade-what-will-be-sanctioned-next>, diakses pada 16 Maret 2016, pukul 08. 55 WIB.

Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2013 tersebut, memberikan dampak terhadap menurunnya nilai perdagangan atau ekspor-impor antara Korea Utara dengan Tiongkok. Pasalnya, mulai dari tahun 2002, perdagangan yang dilakukan antara Korea Utara dengan Tiongkok terus mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2006 nilai perdagangan tersebut tidak stabil. Akan tetapi, pada tahun 2014 – 2015 perdagangan ekspor-impor yang dilakukan Korea

Utara dengan Tiongkok terus mengalami penurunan dan penurunan tersebut cenderung berlanjut dalam waktu dekat (Boydston, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yaitu: “Mengapa uji coba nuklir Korea Utara memberikan dampak terhadap menurunnya ekspor-impor Korea Utara dengan Tiongkok?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Internasional

Dalam Ilmu Politik dikenal beberapa unit analisa yang salah satu diantaranya adalah mengenai Hubungan Internasional. Sebagai satu unit analisa, dalam permasalahan tentang Hubungan Internasional dikenal dengan beberapa sub unit analisa yang diantaranya adalah Politik Internasional dan Politik Luar Negeri. Hubungan Internasional, Politik Internasional dan Politik Luar Negeri merupakan suatu analisa yang saling terkait dan sulit untuk dikenali batasnya (Warsito, 1998).

Sebagian besar studi tentang “politik dunia” atau politik internasional memiliki fakta tentang studi yang ada pada politik luar negeri dan berfokus untuk menjelaskan tentang kepentingan, tindakan, elemen kekuatan dari kekuatan yang paling besar. Perbedaan dari politik internasional dan politik luar negeri sendiri adalah istilah yang ada dalam hubungan internasional dapat merujuk pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang terpisah, apakah di dukung oleh pemerintah atau tidak.

Hubungan internasional akan mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi kepentingan dalam semua aspek hubungan antara masyarakat yang berbeda dan hal itu juga akan

mencakup tentang studi Serikat Pekerja Internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan pengembangan nilai dan etika internasional. Sedangkan politik internasional sendiri tidak berkaitan dengan jenis hubungan atau fenomena ini, kecuali di mana mereka dipekerjakan oleh pemerintah sebagai alat pancingan untuk mencapai tujuan militer atau politik (Holsti, 1981). Sedangkan politik domestik atau politik dalam negeri merupakan bagian penting dari politik luar negeri (D.Fearon, 1998).

K.J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* menyebutkan bahwa :

“Proses politik internasional bermula ketika suatu negara melalui tindakan atau isyarat, berusaha mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain, misalnya: tindakan, kesan dan kebijaksanaannya. Dalam politik internasional tindakan dan isyarat digunakan dalam bentuk yang berbeda misalnya janji memberikan bantuan luar negeri, propaganda, pameran kekuatan militer, pemakaian hak veto pada Dewan Keamanan PBB, *Walk out* dalam konferensi, menyelenggarakan konferensi, memberikan peringatan melalui nota diplomatik, mengirim bantuan senjata dan uang kepada gerakan pembebasan, mengadakan boikot terhadap barang-barang negara lain atau menyatakan perang.”

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional yang membahas mengenai keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Politik internasional sepertihalnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dandukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara lawan dan kawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan suatu negara lain (Sikumbang, 2012).

Selain itu, politik internasional lebih berfokus dengan perdagangan internasional hanya untuk memperluas pemerintahan yang mungkin menggunakan ancaman ekonomi atau hukuman untuk tujuan politik disaat pemerintahan berjanji untuk menurunkan bea cukai (Holsti, 1981, hal. 22).

K.J. Holsti juga menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *International Politics A Framework for Analysis*, bahwa :

“Dari perspektif negara individu, politik internasional berusaha untuk menjelaskan tindakan suatu negara yang lebih mendahulukan kondisi domestik atau dalam negeri yang mempengaruhi adanya pembuatan terhadap suatu kebijakan. Peperangan, alisansi, gerakan diplomatik, pengasingan diri, dan dan tujuan dari aksi diplomatik lainnya dapat dilihat sebagai hasil dari tekanan politik dalam negeri, ideologi nasional, opini masyarakat, atau kebutuhan ekonomi dan sosial.” (Holsti, 1981, hal. 17)

Apabila politik internasional didefinisikan sebagai “kekuatan politik” atau “pencari kekuasaan”, secara sederhana terdapat beberapa kerangka kerja, pendekatan atau suatu teori percobaan yang menunjukkan batasan-batasan dari subject dan membantu menyusun kembali beberapa fakta yang ada dalam kehidupan internasional bersama. Hal ini menunjukkan variabel yang dapat membantu untuk

menjelaskan tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara luar. Internasional politik juga dapat dipahami sebagai *struggle for power* atau perjuangan kekuasaan diantara semua negara baik untuk perluasan atau untuk pertahanan dan perlindungan. (Holsti, 1981, hal. 16).

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa Korea Utara membuat kebijakan berupa nuklir sebagai instrumen diplomasinya untuk dapat mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya. Karena Korea Utara memiliki kondisi ekonomi yang minim, sehingga Korea Utara hanya bisa mengandalkan kekuatan senjata nuklir yang dimilikinya untuk mendapatkan *power* atau kekuasaan dan pengakuan dari dunia internasional.

2. Teori Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah "*branch of science of a statesman or legislator*" dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Sedangkan menurut Mochtar Mas' oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Perhatian mengenai interaksi antara fenomena politik dan ekonomi sudah sejak lama mewarnai studi hubungan internasional. Ajaran kaum merkantilis yang mendominasi studi ini pada abad ke-17, yang kemudian dilanjutkan oleh kaum Marxis sampai abad ke-20 dan menegaskan perlunya fokus pada masalah-masalah Ekonomi Politik Internasional (EPI). Sementara itu, dalam hubungan internasional sendiriberkembang beberapa pendekatan yang membantu munculnya EPI. Studi kawasan, terutama yang memusatkan penelitian pada potensi-potensi bagi kerjasama integratif, mengembangkan pendekatan multi-disipliner yang menekankan politik hubungan ekonomi internasional.

Analisis studi seperti ini menempatkan saling-keterkaitan antara politik, ekonomi, dan budaya sebagai pusat analisis (Mas'ood M. , 1995). Studi tentang ekonomi politik internasional ini tergantung pada teori dan wawasan ekonomi neoklasik. Akan tetapi, studi ekonomi politik internasional dan ekonomi neoklasik merupakan dua hal yang berbeda ketika menerapkan mode analisisnya sendiri (Gilpin, 2001).

Dalam bukunya yang berjudul *Global Political Economy : Understanding the International Economic Order*, Robert Gilpin mengungkapkan bahwa:

“Sebagian besar pakar ekonomi dan politik ekonomi percaya bahwa ekonomi internasional memiliki dampak positif terhadap suatu tindakan dalam politik internasional. Banyak yang berpendapat bahwa ekonomi internasional menciptakan jaringan saling ketergantungan dalam kepentingan bersama yang menjadikan perilaku negara berpusat pada diri sendiri.” (Gilpin, 2001)

Selain itu, K.J Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* menyebutkan bahwa :

“Politik Internasional prihatin dengan adanya perdagangan internasional dalam tingkat pemerintah dengan menggunakan ancaman ekonomi, suatu penghargaan, atau hukuman untuk tujuan politik, seperti ketika mereka berjanji untuk menurunkan tarif yang tidak saling memihak negara lain dengan imbalan hak untuk mendirikan pangkalan militer di negara tersebut.” (Holsti, 1981)

Berdasarkan uraian diatas bahwa Korea Utara menggunakan program nuklirnya ini sebagai salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara luar karena, program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara ini dianggap dapat mengancam keamanan dunia internasional sehingga Korea Utara memanfaatkannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan ekspor-impor.

D. Hipotesa

Jawaban sementara yang perlu diverifikasi di pembahasan selanjutnya berdasarkan kerangka pemikiran Politik Internasional dan Ekonomi Politik Internasional, maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan uji coba nuklir Korea Utara memberikan dampak terhadap menurunnya nilai ekspor-impor Korea Utara-Tiongkok karena :

1. Adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru mengenai Korea Utara, berisi sanksi paling keras dan banyak ketentuan ketat yang sebelumnya belum pernah terjadi di rezim sanksi Korea Utara, seperti inspeksi kargo wajib dan sanksi sektoral terhadap perdagangan sumber daya alam Korea Utara yang akan berdampak pada perdagangan Korea Utara dengan Tiongkok, karena akan meningkatkan biaya transaksi dan mempercepat penurunan ekspor mineral Korea Utara ke Tiongkok.
2. Banyaknya kecaman yang diberikan oleh dunia internasional kepada Korea Utara yang akan berdampak ke Tiongkok, dimana banyak negara – negara di dunia (khususnya Amerika Serikat) merasa bahwa uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut sangat mengancam keamanan nasional negara mereka dan terus mencoba untuk

mendesak Tiongkok supaya Korea Utara segera menghentikan pengembangan uji coba nuklirnya karena Tiongkok dianggap merupakan satu – satunya negara yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemberhentian uji coba nuklir Korea Utara. Hal ini menyebabkan posisi Tiongkok menjadi dilematis, karena Tiongkok telah menggalang kepercayaan internasional dan apabila uji coba nuklir Korea Utara diabaikan, akan semakin membuat Tiongkok tidak dipercaya di mata internasional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dapat berdampak terhadap menurunnya nilai ekspor-impor Korea Utara dengan Tiongkok.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penulisan karya tulis ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan karya tulis ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu penulis membatasi karya tulis ini dengan melakukan pembahasan terkait uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan dapat berdampak terhadap menurunnya Korea Utara nilai ekspor – impor Korea Utara dengan Tiongkok khususnya di tahun 2013. Pengambilan di tahun 2013 ini, karena uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara ini dianggap sebagai uji coba nuklir terbesar apabila dibandingkan dengan uji coba nuklir sebelumnya dan juga memberikan dampak terhadap dunia internasional. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan peneliti untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan

G. Metode Analisis

Metode analisis dalam karya tulis ini adalah *content analysis* yaitu dengan pengumpulan informasi yang dibutuhkan, dilakukan dengan mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan kasus yang dibahas didalam karya tulis dengan diperoleh dari buku-buku atau internet. Karya tulis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan berbagai literatur sebagai sumber data dimana menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data , misalnya lewat orang asing atau lewat dokumen (Sugiyono, 2008). Unit analisis dalam karya tulis ini adalah unit analisis negara.

H. Sistematika Penulisan

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan pada bab ini dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas.

Bab II akan membahas mengenai dinamika uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pembahasan akan diawali dengan sejarah nuklir Korea Utara dimana Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasinya, bergabungnya Korea Utara dengan IAEA, dan kesepakatan yang dibuat antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yaitu Geneva Agreement Framework. Kemudian akan diakhiri dengan pembahasan mengenai sejarah uji coba nuklir yang dilakukn oleh Korea Utara dari tahun 2006 – 2013.

Bab III akan membahas mengenai dinamika perdagangan bilateral antara Korea Utara dengan Tiongkok. Pembahasan akan diawali dengan menjelaskan Tiongkok sebagai salah satu negara yang berpengaruh bagi Korea Utara dimana Tiongkok merupakan rekan dagang utama Korea Utara dan upaya Tiongkok dalam mempertahankan rezim Korea

Utara. Diantara banyaknya negara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara, Tiongkok dianggap sebagai aliansi paling penting sepanjang sejarah dan eksistensi Korea Utara. Selain itu, akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Tiongkok dan Korea Utara di dunia. Kemudian diakhiri dengan merenggangnya hubungan Korea Utara dengan Tiongkok pasca uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013.

Bab IV akan membahas mengenai alasan uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 yang dapat memberikan dampak terhadap menurunnya ekspor-impor Korea Utara dengan Tiongkok. Pembahasan berisi pemaparan mengenai sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 dan ancaman ancaman yang diberikan oleh dunia internasional kepada Korea Utara terkait uji coba nuklir Korea Utara.

Bab V merupakan bab kesimpulan yang akan menyimpulkan dari seluruh uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.